

MaPOM³

Majalah Pengawasan Obat dan Makanan

*Dukung Obat Tradisional Indonesia
Berdaya Saing Global*

*Pengawasan Obat Bersama,
Perkuat Ketahanan Bangsa*



VISI

Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

MISI

1. Memfasilitasi pengembangan industri obat dan makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM.
2. Memperkuat fungsi pengawasan untuk memastikan obat dan makanan sampai ke masyarakat terjamin aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.
3. Memperkuat kemitraan dengan lintas sektor, lintas pemerintahan, akademisi, masyarakat, media, dan peran serta masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan.
4. Meningkatkan kelembagaan dan kapasitas SDM pengawasan obat dan makanan, tidak hanya di Badan POM tetapi juga lintas sektor dan lintas pemerintahan.



Catatan REDAKSI

Kami segenap redaksi MaPOM mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT karena majalah ini telah terbit untuk yang ketiga kalinya untuk membagikan informasi terkait kegiatan-kegiatan Badan POM RI selama bulan Juli sampai dengan September 2019.

Para pembaca setia Majalah Pengawasan Obat dan Makanan (MaPOM), pada edisi kali ini, tim redaksi mengangkat tema seputar 3 (tiga) tahun kinerja Badan POM dalam melayani negeri. Hal ini bertepatan dengan masa kerja Kepala Badan POM RI yang pada edisi ini memasuki 3 tahun kepemimpinan beliau.

Selama 3 (tiga) tahun ini, telah banyak perubahan yang dilakukan Badan POM, salah satunya adalah dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan. Dengan terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini merupakan dukungan Presiden kepada Badan POM untuk bisa bekerja lebih optimal.

Berbagai langkah juga telah dilakukan untuk menambah amunisi Badan POM. Salah satunya dengan melakukan restrukturisasi organisasi di tubuh Badan POM dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perpres ini mengatur penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM salah satunya kewenangan untuk melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

DPR RI juga menyetujui langkah Badan POM melakukan perkuatan kelembagaan dengan menginisiasi Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM). RUU POM diinisiasi DPR, untuk menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan mengenai Obat dan Makanan palsu atau ilegal.

Selain itu, Badan POM mendukung pengembangan potensi produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui pendampingan dalam hal pengemasan, teknologi dalam berproduksi, dan pengetahuan dalam akses pasar. Dan pada tahun 2018, Badan POM bersama tujuh Kementerian/Lembaga (K/L) meluncurkan program terpadu "Pengembangan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik dan Pangan Berdaya Saing" untuk memacu roda perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Di sektor industri, Badan POM juga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri melalui berbagai upaya percepatan pengembangan obat untuk peningkatan kapasitas industri farmasi dan pengawalan terhadap kemudahan investasi bagi Industri Farmasi, sesuai amanah dalam Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

Badan POM juga melakukan langkah konkrit terkait hilirisasi riset dan penelitian untuk dapat dimanfaatkan secara komersial melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka, serta Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Obat dan Produk Biologi. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang intensif untuk hilirisasi/pemanfaatan hasil penelitian menjadi fitofarmaka maupun hasil penelitian obat dan produk biologi melalui sinergi peran peneliti/akademisi, industri, dan dukungan fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah.

Segala upaya telah dilakukan oleh Badan POM namun masih memerlukan banyak perbaikan. Badan POM mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama melayani dan melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia.

REDAKSI :

Penanggungjawab:

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan

Redaktur:

- Kepala Bagian Komunikasi dan Publikasi

Editor:

- Kepala Sub Bagian Publikasi
- Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Media
- Kepala Sub Bagian Pengelolaan Opini Publik

Sekretariat:

- Dian Hermawati, S.Farm., Apt
- Fathan Nur Hamidi, S.Sos.I
- Bayu Kresna Septianto Anggoro, S.Farm., Apt
- Chandra Wino Adhanunggar, S.Ikom
- Hendriq Fauzan Kusfanto, S.Farm., Apt
- Devi Oktaviani, S.Ikom
- Muhammad Rizky, SE
- Benny Robin, SE
- Yanuar Rahman, S.Ikom
- Moch. Rahardi Putranto
- Fadlan Khairul Anam, S. Sos
- Armacata. S.Tr., Ikom
- Faisal Nur Jabbar, A. Md
- Chyntia Dewi Nurhayati Suharma, S.T.P
- Grace Meity Ariani
- Tri Kuswantoro



Jalan Percetakan Negara Nomor 23
Jakarta - 10560 - Indonesia
Selengkapnya

+6221 4244691 / 42883309 / 42883462

+6221 4263333

+6281 21 9999 533 (SMS)

ppid@pom.go.id; halobpom@pom.go.id
pengaduanyanblik@pom.go.id

@bpom_ri

@bpom.official

bpom_ri

Badan POM RI

DAFTAR ISI



CATAATAN REDAKSI	03
LINTAS INFO	06
Pengawasan Obat dan Makanan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Daerah	06
LAPORAN UTAMA	08
Pentingkah “UU Pengawasan Obat dan Makanan” bagi masyarakat?	08
Tepat 3 Tahun Penny K. Lukito Menjadi Nahkoda Badan POM	10
Dorong Kesadaran Masyarakat Untuk Baca Label	13
JELAJAH	14
Bentengi Teras Negara, Pom Akan Hadir di Kalimantan Utara (Kaltara)	14
Persempit Jalur Masuk Produk Ilegal, Badan Pom Perkuat Pengawasan di Wilayah Perbatasan	16
PERKUATAN KELEMBAGAAN	18
Sdm Kompeten dan Kooperatif, Kunci Keberhasilan Tata Kelola Manajemen Laboratorium Sesuai Aspek GLP	18
PENEGAKAN HUKUM	20
Karawang Sentra Industri Kosmetik Bebas Merkuri	20
PENINGKATAN DAYA SAING	22
Potensi Industri Farmasi Indonesia Untuk Tumbuhkan Perekonomian Nasional	22
Sinergi Wujudkan Keamanan Pangan	24
INOVASI PELAYANAN PUBLIK	26
Lebih Mudah Konsultasi Izin Edar Dengan Seminar Online	26
KOORDINASI LINTAS SEKTOR	28
Penandatanganan Kesepakatan Bersama Badan POM RI	28
KERJASAMA INTERNASIONAL	29
Dukung Obat Tradisional Indonesia Berdaya Saing Global	29
PERAN MASYARAKAT	32
Pengawasan Obat Bersama, Perkuat Ketahanan Bangsa	32
AYO BUANG SAMPAH OBAT	34
PRESTASI	36
GALERI BADAN POM	38
WACANA	42
Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74	42
HUMANIKA	44
Idul Adha, Pengorbanan untuk yang dicintai	44
JENDELA	45
SIAPA MISSKLIK?	46
KOMIK MISS KLIK	48



SAHABAT BADAN POM BERTANYA HaloBPOM MENJAWAB

- ☎ 081 191 81 533
- 💬 081 21 9999 33
- ✉ halobpom@pom.go.id
- 🐦 @BPOM_RI
- 📷 bpm_ri



Pertanyaan:

Apakah Badan POM dapat menerima pengujian kandungan kosmetik untuk kepentingan pribadi?

Jawaban:

Badan POM tidak menerima pengujian kosmetik untuk kepentingan pribadi, pengujian dapat dilakukan di laboratorium terakreditasi setempat. Untuk mengetahui laboratorium terakreditasi dapat menghubungi Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada nomor (021) 3927433-34, 3927422.

Pertanyaan:

Apakah produk kosmetik yang diberikan berdasarkan resep dokter spesialis kulit aman digunakan walaupun tidak terdaftar di Badan POM?

Jawaban:

Keamanan produk kosmetik yang diterima pasien berdasarkan hasil konsultasi langsung dan melalui resep dokter spesialis kulit sepenuhnya menjadi tanggung jawab dokter dan kosmetik tersebut tidak perlu didaftarkan di Badan POM.

Pertanyaan:

Kapan batas akhir kosmetik masih dapat digunakan jika pada kemasan tertulis tanggal kedaluwarsa Agustus 2019?

Jawaban:

Kosmetik yang padaemasannya tertulis kedaluwarsa terdiri dari bulan dan tahun artinya produk tersebut masih aman digunakan maksimal hingga akhir bulan yang tercantum pada kemasan yaitu tanggal terakhir bulan Agustus 2019 sepanjang disimpan sesuai petunjuk penyimpanan.

Pertanyaan :

Bagaimana cara pengurusan kosmetik impor untuk keperluan pribadi?

Jawaban:

Pengurusan kosmetik impor untuk keperluan pribadi yang dibawa oleh penumpang (untuk barang bawaan penumpang) dan pemilik barang (untuk barang kiriman) dilakukan dengan mengisi formulir yang disediakan oleh Bea Cukai sebagaimana yang tercantum pada Lampiran III Peraturan Kepala Badan POM No. 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke dalam Wilayah Indonesia.

Pertanyaan:

Apakah Badan POM dapat menerbitkan Special Access Scheme (SAS) kosmetik untuk keperluan sampel registrasi?

Jawaban:

Badan POM dapat menerbitkan Special Access Scheme (SAS) untuk keperluan sampel registrasi, riset atau pameran.

Pengawasan Obat dan Makanan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Daerah



Badan POM Goes to School Penyuluhan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah di Sekolah Dasar Negeri Belo Kabupaten Bima, (23/7). Kantor Badan POM di Kabupaten Bima memberikan sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan keamanan pangan jajan anak sekolah kepada perwakilan murid kelas empat, lima dan enam sebanyak 62 murid.



Balai POM di Manokwari lakukan Langkah Antisipatif Sosialisasi Mekanisme Penanggulangan KLB Keracunan Pangan di Teminabuan - Kabupaten Sorong Selatan, (19/7).



Kampanye Pasar Aman di Pasar Sehat Sabilulungan, Cicalengka, Kabupaten Bandung, (7/8). Kegiatan ini merupakan bagian dari serangkaian kegiatan Pasar Aman yang dilaksanakan oleh Balai Besar POM di Bandung sejak tahun 2013.



Launching Ayo Buang Sampah Obat – Gerakan Waspada Obat Ilegal. Kegiatan ini diikuti oleh 300 (tiga ratus) peserta mencakup lintas sektor, Yogyakarta (1/9).



Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar menggelar acara *Launching* Program Nasional “Ayo Cek KLIK Sebelum Belanja!”, dengan tema “Ayo Cek KLIK, Pilih Obat dan Makanan Aman!”. Acara ini bekerja sama dengan APRINDO (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia) dan dilaksanakan serentak di 5 Kota yaitu Denpasar, Palembang, Manado, Surabaya dan Samarinda, (7/9).



LAPORAN UTAMA

Pentingkah “UU Pengawasan Obat dan Makanan” bagi masyarakat?

RUU Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) yang sesaat lagi akan bermetamorfosis menjadi UU POM, digadang-gadang akan menjadi landasan penguatan bagi Badan POM, lembaga yang secara konstitusional diamanatkan negara untuk melakukan pengawasan di bidang Obat dan Makanan. Lalu apa dampaknya secara langsung bagi masyarakat jika UU POM ini benar-benar hadir di tengah-tengah kita?

Banyak pihak yang berharap UU POM segera lahir untuk memberikan perkuatan penjaminan keamanan Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia sekaligus mendorong daya saing bangsa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia untuk Indonesia Maju di masa mendatang.

Sebagaimana diketahui bahwa Badan POM belum mendapatkan kewenangan yang utuh, penuh, dan menyeluruh. Bagai kaki, Badan POM berusaha untuk bisa berlari walaupun tanpa sepatu dan perlengkapan yang cukup.

Terlebih dengan 270 juta penduduk Indonesia dan luasnya cakupan pengawasan wilayah yang terbentang dari ujung Sabang hingga Merauke, keberadaan Badan POM dengan SDM dan sarana-prasarana yang ada masihlah terbatas.

Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan telah bergulir sejak pertengahan tahun 2016.

Di tahun 2018 lalu, RUU ini bahkan telah masuk dalam program legislasi nasional. Hingga di ujung akhir masa kepengurusan DPR RI 2014-2019, rancangan aturan yang diinisiasi oleh DPR RI ini masih berproses untuk menjadi Undang-Undang.

Melihat tren kejahatan kemanusiaan di bidang Obat dan Makanan yang meningkat dari tahun ke tahun, membuat kita semakin miris. Di satu sisi kinerja Badan POM terbukti dalam melakukan pengawasan disertai upaya penegakan hukum dengan menindak para pelaku kejahatan. Di sisi lain, kita dapat melihat bahwa kejahatan ini menjamur dengan sangat mudahnya. Mungkin salah satu penyebabnya karena sanksi yang diberikan tidak membuat jera para pelaku. Jika sudah begini masyarakat lah yang paling merugi.

Dalam melakukan penindakan pun, Badan POM tidak memiliki kewenangan penuh. Para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) hanya dapat melakukan aksinya bersama dengan aparat penegak hukum, antara lain Kepolisian. Proses seperti penyelidikan, penindakan, penyitaan, pengamanan, penangkapan, hingga penyelesaian kasus perkara di meja hukum, masih abu-abu bagi Badan POM untuk bisa dilakukan secara mandiri. PPNS Badan POM belum memiliki perangkat kewenangan yang paripurna untuk menjalankan tugasnya secara sempurna. Maka dari itu, penguatan kewenangan PPNS Badan POM sangatlah mutlak diperlukan agar dapat bekerja secara optimal. Hal tersebut tertuang dalam RUU POM yang sedang dibahas oleh Pemerintah dan DPR, termasuk di dalamnya pengaturan tentang sanksi yang membuat efek jera bagi para pelaku kejahatan.

Tidak hanya itu, berkembang pesatnya kemajuan teknologi juga berpengaruh bagi dunia bisnis penjualan Obat dan Makanan. Banyak produk Obat dan Makanan ilegal yang dijual melalui *marketplace* secara *e-commerce*. Belum ada regulasi yang secara jelas dan gamblang menjabarkan terkait pengaturan penjualan Obat dan Makanan secara daring. Disinilah UU POM menjadi solusi untuk menjawab tantangan peredaran Obat dan Makanan *online*. Semua akan diatur, mulai dari pengawasan hingga persyaratan teknis mengenai izin iklan.

Membangun masyarakat cerdas dan sehat

Sistem pengawasan Obat dan Makanan terdiri dari tiga lapis yakni pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Ketiganya merupakan sistem utuh yang saling melengkapi dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermanfaat, dan bermutu bagi semua. Masyarakat dapat membentengi dirinya dengan menjadi konsumen cerdas dalam memilih dan memilah Obat dan Makanan yang mereka konsumsi.

Badan POM dalam hal ini berperan sebagai “*enabler*” untuk menjadikan masyarakat cerdas dan sehat. Komunikasi, informasi dan edukasi terus dilakukan secara berkelanjutan baik melalui sosialisasi, kampanye-kampanye positif di pusat keramaian, pameran informasi, hingga pemanfaatan sosial media dalam edukasi publik.

RUU POM juga mengatur terkait jenis obat. Dalam RUU ini, obat hanya dibagi menjadi dua jenis yaitu harus dengan resep dokter dan tidak menggunakan resep dokter. Sebelumnya diketahui ada 4 golongan obat berdasarkan warna logo lingkaran. Dengan adanya RUU ini, penggolongan disederhanakan, sehingga masyarakat lebih mudah membedakannya dengan sangat jelas.

Penggolongan obat dimaksudkan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat berdasarkan tingkat risiko keamanan obat bila digunakan pasien. Penggolongan suatu obat dapat berubah ke tingkat risiko yang lebih aman bila dalam penggunaannya selama bertahun-tahun tidak ditemukan efek samping yang membahayakan atau dapat ke tingkat risiko yang harus diwaspadai.

Badan POM adalah lembaga yang melakukan evaluasi terhadap keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu sebelum diterbitkan izin edar. Dengan pertimbangan bahwa penetapan penggolongan

suatu obat ditetapkan dalam proses pemberian izin edar, maka akan lebih tepat penggolongan suatu obat dilakukan oleh Badan POM, dan evaluasi obat digolongkan dalam beberapa kelompok berdasarkan pertimbangan tingkat risiko.

Mendorong daya saing bangsa

Daya saing bangsa adalah hal yang tidak bisa ditawar di era globalisasi saat ini. Indonesia harus dapat menjadi pemain utama dalam kancah global, menjadi produsen bukan hanya konsumen. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan mempercepat segala perizinan secara komprehensif, mendorong para pelaku usaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik agar mampu bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

Pada RUU POM, kewenangan terkait perizinan Obat dan Makanan yang sebelumnya tersebar di beberapa kementerian, akan dilimpahkan kepada Badan POM untuk mempercepat semua aspek pengawasannya. Melalui RUU ini, Badan POM akan memiliki wewenang dalam mengatur perizinan industri farmasi, wewenang mengenai standar bahan baku baru untuk obat, hingga perizinan produk.

Pemanfaatan kekayaan herbal Indonesia juga perlu didorong dengan hilirisasi, sehingga penelitian studi ilmiah dapat bertransformasi menjadi produk skala industri. Badan POM telah menginisiasi pembentukan Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka. Tujuan utamanya agar obat tradisional Indonesia mampu berdaya saing global.

Ketua Dewan Pembina Gabungan Pengusaha Jamu Indonesia (GP Jamu), Charles Saerang mengungkapkan bahwa Badan POM selama ini telah membantu dan membina industri jamu di Indonesia. Menurutnya, sebagai regulator, wewenang Badan POM untuk jamu harus ditambah untuk melakukan pembinaan jamu dalam RUU ini.

Sementara Ketua Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI), Adhi Lukman berpendapat bahwa Badan POM seharusnya yang memegang wewenang tunggal kebijakan satu pintu dalam hal pengawasan. Hal ini perlu diperjelas karena saat ini pengawasan keamanan pangan di Indonesia terpecah di banyak institusi, baik pusat maupun daerah. Setiap lembaga memiliki batas kewenangannya dalam menilai pangan olahan. Dibutuhkan kebijakan satu pintu untuk mengawasi proses dari hulu ke hilir. Dengan kewenangan yang terpusat dan diatur dengan jelas dalam RUU ini, Badan POM dapat membangun sistem pengawasan yang lebih kuat untuk mendorong industri Obat dan Makanan yang tangguh dan mendukung daya saing ekspor.

Pengawasan Full Spectrum

Pada akhirnya masyarakat akan merasakan hasil pengawasan Obat dan Makanan secara *full spectrum* oleh Badan POM. Dimulai dari hulu ke hilir, dari proses produksi hingga distribusi, dimulai dari pembuatan standar hingga penilaian, pengawasan sebelum beredar hingga saat beredar, dari pembinaan hingga penindakan, dan dari wilayah terkecil hingga kota besar. Semua akan terlaksana secara komprehensif dengan hadirnya UU POM yang memberikan penguatan bagi kelembagaan dan proses bisnis yang dilaksanakan Badan POM.



“Kinerja 3 Tahun”

Tepat 3 Tahun Penny K. Lukito Menjadi Nahkoda Badan POM

Sebelum dilantik menjadi Kepala Badan POM RI, Dr. Ir. Penny Kusumastuti Lukito, MCP. atau yang lebih dikenal dengan Penny K. Lukito, merupakan birokrat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Penny K. Lukito resmi menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) RI sejak 20 Juli 2016 lalu. Beliau merupakan Kepala Badan POM pertama yang dilantik langsung oleh Presiden Republik Indonesia di Istana Negara, dengan tugas khusus untuk membenahi Badan POM.

Latar belakang pendidikan Kepala Badan POM ke-6 ini adalah Sarjana ITB jurusan Teknik Lingkungan pada 1988. Selanjutnya Penny K. Lukito melanjutkan program Master in City Planning (MCP) dalam bidang Perencanaan dan Kebijakan Lingkungan (Environmental Policy and Planning) dari Department of Urban Studies and Planning, di Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge-Massachusetts, Amerika Serikat pada 1994. Beliau juga mengambil program Ph.D dengan major bidang Teknik Lingkungan di Department Civil and Environmental Engineering dan minor pada City and Regional Planning, University of Wisconsin-Madison Amerika Serikat pada tahun 2000.

Perkuatan Badan POM

Presiden Joko Widodo menyadari pentingnya peningkatan kapasitas kelembagaan Badan POM. Badan POM butuh pemimpin yang mampu melakukan perubahan dengan cepat untuk mendukung program pemerintah, termasuk meningkatkan daya saing industri Obat dan Makanan dalam negeri. Presiden Joko Widodo menunjuk Penny K. Lukito

untuk membenahi Badan POM. Tidak hanya itu, dukungan Presiden terhadap kelembagaan Badan POM diwujudkan dengan terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) No 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat Dan Makanan. Munculnya Inpres ini didorong oleh hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Badan POM tahun 2016 yang menunjukkan bahwa hanya 20% dari rekomendasi Badan POM yang ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten.

Kepala Badan POM menilai bahwa terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2017 ini merupakan dukungan Presiden kepada Badan POM untuk bisa bekerja lebih optimal. “Inpres Nomor 3 Tahun 2017 merupakan jalan awal bagi Badan POM untuk dapat bekerja secara maksimal, melalui sinergi dengan lintas sektor dan pemerintah daerah dalam menjalankan kinerja pengawasan nantinya, agar sesuai dengan harapan Presiden dan masyarakat Indonesia seluruhnya,” Jelas Penny K. Lukito.

Pada tahun yang sama, Kepala Badan POM melakukan berbagai langkah untuk menambah amunisi Badan POM. Salah satunya adalah dengan melakukan restrukturisasi organisasi di tubuh Badan POM. Hal itu diamini dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perpres ini mengatur penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan Badan POM salah satunya kewenangan untuk melakukan intelijen dan penyidikan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam Perpres ini Badan POM diperkuat dengan adanya Kedeputian baru yaitu Kedeputian Bidang Penindakan. Kedeputian yang dipimpin oleh pejabat eselon I ini bertugas mencegah, menangkal, melakukan tindakan intelijen, menyidik dan menindak pelanggaran peredaran Obat dan Makanan ilegal. Tidak hanya itu, Penny K. Lukito juga menambah cakupan pengawasan di 40 kabupaten/kota sebagai langkah perlindungan Badan POM kepada masyarakat di seluruh pelosok tanah air hingga wilayah terpencil.

Dengan Perpres Nomor 80 Tahun 2017, Kepala Badan POM mendapatkan “energi” untuk memperkuat kelembagaannya. “Ini merupakan tahap lanjutan perkuatan kelembagaan Badan POM melalui pembentukan 40 (empat puluh) Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota yang merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018”, ungkap Penny K. Lukito saat melantik 40 Kepala Loka/Kantor POM (15/08/18).

Tugas dan fungsi Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota sama seperti Balai Besar/Balai POM yaitu melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi maupun distribusi Obat dan Makanan, sertifikasi produk, pengujian, hingga pengawasan fasilitas kefarmasian.

DPR RI juga menyetujui langkah Kepala Badan POM dalam melakukan perkuatan kelembagaan. Komisi IX DPR RI menginisiasi Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM). Ketua Komisi IX DPR RI, Dede Yusuf mengatakan bahwa RUU POM adalah inisiatif DPR, untuk menindaklanjuti temuan-temuan di lapangan mengenai Obat dan Makanan palsu atau ilegal. “Kami melihat pentingnya keberadaan sebuah badan yang melakukan fungsi pengawasan terhadap produk yang beredar, apalagi Obat dan Makanan yang menjadi kebutuhan hidup sehari-hari, harus dipayungi undang-undang,” kata Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Selasa (23/01/18).

Penny K. Lukito menegaskan pentingnya UU POM. “Kejahatan di bidang Obat dan Makanan sangat kritis dan memunculkan tantangan yang semakin besar. Hal ini menjadi alasan mendesaknya UU POM,” tegas Penny K. Lukito. “UU POM ini juga pada marwahnya mengedepankan semangat lintas sektor guna melakukan pengawasan dan penindakan secara menyeluruh,” lanjutnya. Saat ini pembahasan RUU Pengawasan Obat dan Makanan dilanjutkan oleh anggota DPR periode baru 2019-2024.



Asistensi Industri Obat dan Makanan

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito mengidentifikasi beberapa hambatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mengembangkan potensi produknya antara lain pengemasan, teknologi dalam berproduksi, dan akses pasar. Selain itu, menurutnya pembinaan UMKM juga tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) yang semestinya bisa dilakukan bersama-sama untuk hasil yang optimal.

“Industri UMKM ini juga berkontribusi sangat signifikan dalam menyediakan produk Obat dan Makanan yang aman, bermanfaat, dan bermutu. Namun di sisi lain, industri skala ini pada umumnya menghadapi berbagai keterbatasan seperti modal, fasilitas, pemasaran produk, dan sumber daya manusia untuk menghasilkan produk berdaya saing. Oleh karena itu semua K/L perlu duduk bersama tidak jalan sendiri-sendiri,”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

Pada tahun 2018 Badan POM bersama tujuh K/L meluncurkan program terpadu “Pengembangan UMKM Obat Tradisional, Kosmetik, dan Pangan Berdaya Saing”. Kepala Badan POM menyampaikan bahwa hal ini sesuai dengan poin ke-3 dan ke-6 dari Nawacita Presiden Joko Widodo, dimana peningkatan produktivitas IKM/UMKM harus dilakukan agar produk yang dihasilkan dapat berdaya saing di pasar internasional dan global, sekaligus memacu roda perekonomian masyarakat kecil dan menengah.

Di sektor industri, Badan POM juga memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan industri melalui berbagai upaya percepatan pengembangan obat untuk peningkatan kapasitas industri farmasi dan pengawalan terhadap kemudahan investasi bagi Industri Farmasi, sesuai amanah dalam Inpres Nomor 6 tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Dalam kurun waktu 2016-2018, terdapat 8 (delapan) investasi industri farmasi asing yang telah beroperasi di Indonesia, dan pada tahun 2019 ini terdapat 3 (tiga) investasi industri farmasi asing yang sedang dalam proses kualifikasi fasilitas produksi sesuai standar.

Pembangunan industri tersebut, selain untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan produk kebutuhan obat esensial dalam negeri terkait produk biologi, produk onkologi, dan produk hormon, juga untuk diekspor ke mancanegara. Tumbuhnya iklim investasi yang positif disertai munculnya industri baru di bidang farmasi dengan teknologi mutakhir ini, perlu dukungan penuh pemerintah Indonesia termasuk Badan POM yang saat ini terus mensinergikan komitmen untuk menambah lapangan kerja lokal juga untuk meningkatkan daya saing industri farmasi dan produk nasional.

Badan POM juga melakukan langkah konkrit terkait hilirisasi riset dan penelitian untuk dapat dimanfaatkan secara komersial melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka, serta Satgas Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Obat dan Produk Biologi. Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk membangun koordinasi yang intensif untuk hilirisasi/pemanfaatan hasil penelitian menjadi fitofarmaka maupun hasil penelitian obat dan produk biologi melalui sinergi peran peneliti/akademisi, industri, dan dukungan fasilitasi dan kebijakan dari pemerintah.



“Terdapat empat bidang utama yang menjadi fokus Badan POM untuk Palestina, yaitu penguatan fungsi pengawasan obat, kerja sama di bidang pengawasan keamanan pangan, mendorong pelaku usaha Obat dan Makanan Indonesia untuk berperan aktif dalam penetrasi pasar Obat dan Makanan bagi rakyat Palestina, serta perkuatan kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan Palestina,” (08/10).

Kepala Badan POM RI,
Penny K. Lukito



Peka Terhadap Kemanusiaan

Di bawah kepemimpinan Penny K. Lukito, Badan POM banyak melakukan tugas-tugas kemanusiaan dalam membantu masyarakat saat bencana alam terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti Lombok, Palu, dan Serang. Hampir di setiap kejadian bencana alam Kepala Badan POM beserta jajaran hadir dan membantu masyarakat yang terkena musibah. Penny K. Lukito membentuk tim yang terdiri dari para Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan POM untuk melakukan pendistribusian bantuan ke wilayah-wilayah pemukiman atau posko pengungsian dan juga pengawasan terhadap bantuan Obat dan Makanan yang datang dari berbagai elemen masyarakat yang ikut membantu korban bencana alam.

Awal Oktober lalu, Kepala Badan POM bertolak ke negara Palestina untuk melakukan peningkatan kapasitas regulator obat Palestina. Badan POM memberikan pelatihan di bidang pengawasan obat untuk Palestina. Program bertajuk Good Regulatory Practice in Medicine ini juga diisi dengan bantuan kemanusiaan di kamp Talbieh di Amman, Yordania. Terkait hal ini Badan POM berkomitmen turut mendukung Palestina dalam pengembangan kapasitas regulator pengawasan obat yang berfokus pada fungsi pre-market evaluation dan post-market surveillance dalam bentuk pelatihan dan konsultasi teknis. Hal ini dilakukan untuk membantu regulator Palestina dalam meningkatkan akses obat yang aman, berkualitas, dan terjangkau bagi masyarakat Palestina.

Segala upaya yang dilakukan Penny K. Lukito dalam menahkodai Badan POM untuk memperkuat fungsi dan peran Badan POM bagi bangsa Indonesia, masih memerlukan banyak perbaikan. Menurutnya, perlindungan masyarakat tidak akan optimal tanpa peran aktif dari semua elemen. “Semua upaya peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan tidak akan berjalan optimal tanpa peran aktif dari pelaku usaha, masyarakat, dan K/L lainnya. Karena itu Kepala Badan POM mengajak seluruh pihak untuk bekerja bersama melayani dan melindungi masyarakat dan bangsa Indonesia.





Data survei tentang Pembacaan Label Pangan Olahan yang dilakukan Badan POM tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia untuk membaca label pada pangan olahan masih rendah. Hasil survei tahun 2017 menunjukkan bahwa 55% responden tidak memperhatikan aspek gizi dan kesehatan saat membeli pangan olahan. Selain itu hasil survei menunjukkan 55% responden memperhatikan informasi label produk yang belum pernah dibeli, namun hanya 43% responden yang memperhatikan informasi label produk yang sudah pernah dibeli sebelumnya.

Terkait hal ini, Pemerintah berkewajiban untuk menjamin konsumen memperoleh informasi yang benar pada label, terutama mengenai Informasi Nilai Gizi (ING) dari produk pangan olahan. Karena itu, pada Selasa (03/09) Badan POM melakukan Sosialisasi Pelabelan Gizi Pangan Olahan di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Kegiatan ini dilakukan sehubungan dengan dikeluarkannya regulasi baru terkait pelabelan pangan olahan. Selain itu, pelabelan gizi juga terkait dengan strategi Badan POM dalam upaya pencegahan Penyakit Tidak Menular (PTM) serta masalah stunting dan gizi berlebih di Indonesia.

“PTM menjadi penyebab lebih dari 71% kematian di dunia. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar tahun 2013 – 2018, prevalensi PTM mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dan sebagian besar PTM terkait dengan pola hidup dan pola diet yang tidak sehat,” jelas Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito saat membuka kegiatan.

Untuk itu, adanya informasi yang jelas pada label pangan olahan menjadi hal yang penting agar masyarakat mengetahui apa saja kandungan gizi yang terdapat pada pangan olahan yang dikonsumsi. Melalui sosialisasi hari ini, disampaikan bahwa terdapat revisi dari regulasi tentang ING, termasuk penyederhanaan desain label gizi untuk memudahkan masyarakat dalam memahami ING produk pangan olahan.

“Kami membuat inovasi agar label gizi lebih friendly untuk masyarakat. Pertama, dalam bentuk desain monokrom yang menampilkan highlight kandungan beberapa zat gizi yang terkait dengan PTM seperti energi serta gula, garam, dan lemak (GGL). Kedua berupa logo “Pilihan Lebih Sehat” yang menunjukkan produk pangan tersebut menjadi pilihan produk yang lebih sehat berdasarkan kandungan GGL. Untuk saat ini, logo ini baru diberlakukan untuk produk minuman siap minum dan mi/pasta instan,” papar Kepala Badan POM lebih lanjut.

“Label”

DORONG KESADARAN MASYARAKAT UNTUK BACA LABEL

Penyederhanaan label ini, menurut Penny K. Lukito menjadi salah satu langkah Badan POM untuk mengedukasi masyarakat agar dapat memilih pangan yang sehat dengan kandungan gizi sesuai kebutuhannya. Prioritasnya adalah untuk pemilihan pangan olahan konsumsi anak-anak dalam rangka mencetak generasi sehat untuk wujudkan tujuan dari Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan (RUU POM) yang sejalan dengan visi Indonesia, yaitu SDM unggul Indonesia maju.

Ditambahkan Penny K. Lukito, penerapan label gizi ini menjadi tantangan bagi pelaku usaha untuk menciptakan produk pangan yang lebih sehat dilihat dari kandungan GGL-nya. Selain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah khususnya Badan POM terus meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membaca label pada pangan olahan yang dikonsumsi.

Tentunya untuk mewujudkan tujuan ini perlu ada kerja sama yang baik antar lintas sektor terkait, termasuk pelaku usaha, asosiasi, dan masyarakat sendiri. Oleh karena itu, kegiatan hari ini dihadiri tidak hanya oleh Pejabat Tinggi Madya dan Pratama di Lingkungan Badan POM, melainkan juga oleh lintas sektor terkait antara lain Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), perwakilan Kementerian/Lembaga, perwakilan asosiasi dan organisasi profesi, perwakilan mitra daerah, perwakilan WHO Indonesia, perwakilan *Food and Agriculture Organization* (FAO), perwakilan dari perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan pelaku usaha.

Bentengi Teras Negara, POM Akan Hadir di Kalimantan Utara (Kaltara)



Tepat pada tanggal 25 Oktober 2012 melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, disahkan 5 (lima) Daerah Otonom Baru (DOB). Kaltara menjadi salah satu dari DOB yang disahkan dan secara resmi menjadi provinsi ke-34 di Indonesia. Kaltara merupakan sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan yang secara langsung berbatasan dengan negara tetangga, yaitu Malaysia.

Tujuan pembentukan provinsi ini adalah untuk mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, memperpendek rentang kendali (span of control) pemerintahan, terutama di kawasan perbatasan.

Sebagai salah satu provinsi termuda di Indonesia, Kaltara merupakan salah satu provinsi yang sedang berkembang, tidak hanya dari sektor pembangunan, melainkan juga sektor perdagangan, kelautan, dan perekonomian. Kaltara mengalami pertumbuhan yang pesat, termasuk dalam bidang produksi dan distribusi Obat dan Makanan. Letak geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia membuat Kaltara sebagai jalur lalu lintas peredaran Obat dan Makanan yang masuk ke wilayah Indonesia.



Komitmen Badan POM di daerah Perbatasan

Merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia tentu membuat Provinsi Kaltara rawan digempur berbagai produk Obat dan Makanan ilegal. Sebelumnya, wilayah Provinsi Kaltara merupakan cakupan wilayah kerja Balai Besar POM di Samarinda, yang dibantu dengan Pos POM di Tarakan yang dibentuk dan mulai beroperasi di tahun 2018.

Sadar akan pentingnya melindungi Kaltara dari masuknya berbagai produk ilegal, terutama Obat dan Makanan, Gubernur Kaltara secara resmi mengajukan permohonan pembentukan Balai Besar POM di Provinsi Kaltara melalui Surat Pj. Gubernur Kaltara tanggal 30 September 2013 tentang Pembentukan Kelembagaan Badan POM Pusat di Provinsi Kaltara dan Surat Gubernur Kaltara tanggal 1 Juli 2019 perihal Permohonan Pembentukan Balai Besar POM di Provinsi Kaltara.

Saat ini Badan POM terus melakukan pembenahan termasuk memperluas cakupannya dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan. Di tahun 2018, Badan POM melebarkan jangkauan pengawasannya dengan membentuk 40 (empat puluh) Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Kantor Badan POM di Kota Tarakan dengan wilayah kerja 5 (lima) Kabupaten/Kota yaitu Kota Tarakan, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Bulungan, dan Kabupaten Tana Tidung.



“Badan POM akan memperjuangkan pembentukan Kantor Badan POM, minimal setara eselon III karena merupakan ibukota provinsi,” ujar Kepala Badan POM dalam sambutannya.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito



Pembentukan Balai POM di Provinsi Termuda Indonesia

Menyambut baik permohonan Gubernur Kaltara terkait pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di Wilayah Provinsi Kaltara, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyambangi Kantor Gubernur Kaltara untuk melakukan pembahasan mengenai langkah konkrit penguatan pengawasan Obat dan Makanan, salah satunya dengan rencana pembentukan Balai Besar/Balai POM di Provinsi Kaltara (17/07). Badan POM berkomitmen penuh mengawal pembentukan Balai Besar/Balai POM di Provinsi Kaltara.

Sebagai daerah yang menjadi teras depan negara Indonesia, Kaltara memerlukan benteng yang lebih kuat dari daerah lain untuk melawan bombardir produk Obat dan Makanan ilegal. “Kami menganggap penting hadirnya Badan POM di Kaltara, karena Badan POM memiliki posisi strategis terutama dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan,” ujar Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie.

Dibentuknya Balai POM merupakan langkah awal dan wujud nyata hadirnya pemerintah dalam melindungi masyarakat di daerah perbatasan. Ke depan, Badan POM akan hadir di seluruh negeri termasuk setiap titik-titik perbatasan.

■ Bayu Kresna Septianto Anggoro.

PERSEMPIT JALUR MASUK PRODUK ILEGAL, BADAN POM PERKUAT PENGAWASAN DI WILAYAH PERBATASAN



Kalimantan Barat merupakan provinsi dengan batas darat negara terpanjang di Indonesia, yaitu mencapai 966 km. Ada 5 (lima) pintu masuk resmi yang berbatasan langsung, yaitu Entikong (Kabupaten Sanggau), Aruk (Kabupaten Sambas), Jagoi Babang (Kabupaten Bengkayang), Jasa (Kabupaten Sintang), dan Nanga Badau (Kabupaten Kapuas Hulu). Hal ini berpotensi terhadap risiko masuknya produk Obat dan Makanan ilegal.

Sebagai institusi pengawasan Obat dan Makanan, Badan POM mempunyai peran strategis dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Indonesia melalui pengawasan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk wilayah perbatasan.





Untuk mewujudkan peran tersebut, di sepanjang tahun 2019 ini Badan POM telah melakukan kunjungan kerja di beberapa wilayah perbatasan sebagai komitmen untuk penguatan pengawasan di wilayah perbatasan, diantaranya kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kalimantan Barat pada bulan Februari; Kota Sabang, Provinsi Aceh pada bulan Maret, dan PLBN Skouw, Papua pada bulan Juni.

5 September lalu Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menghadiri acara Focus Group Discussion (FGD) tentang Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan di Perbatasan Negara (POM Border) bersama lintas sektor di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong. FGD ini dihadiri langsung oleh Kepala PLBN di Entikong, Viktorius Dunan beserta lintas sektor terkait.

Pada kesempatan ini, Kepala Badan POM RI menyampaikan bahwa kehadiran Badan POM di perbatasan merupakan wujud nyata kehadiran pemerintah dalam mewujudkan nawacita ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan dengan menginisiasi program Gerakan Bersama yang melibatkan berbagai pihak, baik instansi pemerintah maupun masyarakat sekitar wilayah perbatasan. "Program ini disusun dalam rangka meningkatkan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah perbatasan negara melalui serangkaian kegiatan strategis," jelasnya.

Kegiatan strategis tersebut antara lain diwujudkan melalui pendampingan Custom, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS) di PLBN, help desk dan penyebaran informasi di PLBN, kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), Focus Group Discussion (FGD), Perjanjian Kerja Sama, intensifikasi kegiatan pengawasan Obat dan Makanan, serta sampling dan uji petik di wilayah perbatasan.

Kepala Kantor Bea & Cukai Entikong, Dwi Jogyastara yang turut hadir pada FGD tersebut menyampaikan bahwa Bea & Cukai menyambut baik keberadaan help desk Badan POM, yang membantu Bea & Cukai khususnya informasi terkait pemasukan komoditi obat. Lebih lanjut Dwi Jogyastara menyampaikan bahwa banyak komoditi masuk dari negara tetangga, termasuk produk pangan. "Saat ini Bea & Cukai memiliki aplikasi Siska, sistem informasi lintas batas yang dapat digunakan untuk mengontrol pemasukan komoditi di Entikong," jelasnya. "Sistem ini sudah cukup efektif dan dapat diadopsi oleh PLBN lain," ujarnya lebih lanjut.



"Mari bersama kita tingkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah perbatasan, wujudkan kepastian hukum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta kita dukung Border Tourism dari aspek Amenitas Pariwisata."

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito



Perwakilan dari Karantina Kesehatan juga menyampaikan hal senada, menyambut baik adanya help desk Badan POM. Namun ada beberapa hal yang perlu diperjelas agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dengan adanya sinergi Badan POM dengan lintas sektor di PLBN Entikong ini, diharapkan dapat melindungi masyarakat wilayah perbatasan dari peredaran Obat dan Makanan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, manfaat, dan mutu.

■ Yanuar Rahman



SDM KOMPETEN DAN KOOPERATIF, KUNCI KEBERHASILAN TATA KELOLA MANAJEMEN LABORATORIUM SESUAI ASPEK GLP

Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (PPOMN) memiliki peran penting sebagai garda terdepan Badan POM khususnya dalam menghadapi tantangan pengujian Obat dan Makanan yang semakin bervariasi seiring dengan berkembangnya teknologi terutama dalam hal bioteknologi.

Tugas penting PPOMN untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pengujian Obat dan Makanan, perlu didukung oleh sumber daya yang mumpuni, baik Sumber Daya Manusia (SDM), sarana prasarana, maupun sistem/mechanisme kerja yang efektif dan efisien.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kompetensi sekaligus memupuk nilai persatuan dan jiwa kepemimpinan di PPOMN, maka diselenggarakan rapat koordinasi serta Capacity building yang mengusung tema **“Dengan Kreativitas Didasari Integritas dan Semangat Pancasila, Kita Siap Menghadapi Tantangan Menuju Indonesia Unggul”** (02/08). Kegiatan Capacity Building ini merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas dalam rangka kinerja organisasi, dengan memusatkan perhatian kepada dimensi pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan.





Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa SDM yang kompeten dan kooperatif dibutuhkan untuk mewujudkan tata kelola manajemen laboratorium yang baik dalam ruang lingkup pelaksanaan reformasi birokrasi. “Terlebih mengingat ke depan Badan POM akan menerapkan regionalisasi laboratorium, yang bertujuan untuk efisiensi pengujian termasuk di dalamnya SDM,” ungkap Penny K. Lukito.

Pelaksanaan pengawasan dan pelayanan publik dikatakan optimal ketika seluruh stakeholder mempunyai sinergitas dan semangat kebersamaan yang tinggi, sehingga jajaran Badan POM akan lebih solid dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. “Pegawai PPPOMN juga harus memperkuat kemampuan penyesuaian individu dan organisasi dalam menghadapi perubahan lingkungan yang ada dengan tetap membina hubungan interaksi yang baik,” pesan Kepala Badan POM. “Kita harus senantiasa bisa mengikuti perkembangan yang sangat dinamis,” lanjutnya.

Penny K. Lukito melanjutkan bahwa Badan POM senantiasa berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan publik secara terus-menerus, tidak hanya untuk melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga dalam rangka mendukung pengembangan industri Obat dan Makanan.

■ Rahman



“Diharapkan dengan rapat koordinasi serta Capacity building ini, seluruh pegawai PPPOMN pada khususnya dapat meningkatkan pengetahuannya, keterampilan, serta sikap dan perilakunya.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

Penggalangan Komitmen KOSMETIK BEBAS MERKURI



KARAWANG SENTRA INDUSTRI KOSMETIK BEBAS MERKURI

Masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami bahaya penggunaan kosmetik yang mengandung merkuri, sebabkan masih adanya pelaku usaha yang gunakan merkuri dalam campuran produk kosmetik mereka. Badan POM targetkan “Kosmetika Bebas Merkuri” tahun 2020.

Untuk menjamin masyarakat aman dalam menggunakan Obat dan Makanan termasuk di dalamnya produk kosmetik, Badan POM menginisiasi penggalangan komitmen bersama kosmetik aman bebas merkuri dengan sejumlah stakeholder, diantaranya Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Bareskrim POLRI, Perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat, Asosiasi kosmetik, dan akademisi.

Karawang dipilih sebagai tempat penggalangan komitmen ini karena Karawang dinilai potensial untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) atau industri kosmetik. Hal ini disampaikan Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito pada sambutannya bahwa potensi tersebut dapat berupa potensi positif dan negatif. Sisi positifnya, Karawang memiliki banyak UMKM kosmetik yang dapat dibina untuk menjadi penggerak perekonomian lokal. Sementara negatifnya, ada potensi pelanggaran yang dilakukan oleh UMKM atau industri kosmetik rumahan, terutama bagi yang tidak paham dengan peraturan yang ada.



Berdasarkan hasil pengawasan Badan POM selama tahun 2018, ditemukan 126 miliar rupiah kosmetik ilegal. “Temuan tersebut didominasi oleh produk kosmetik perawatan kulit dengan jenis bahan berbahaya yang teridentifikasi digunakan di dalamnya antara lain merkuri, dan temuan kosmetik mengandung merkuri mencapai hingga 230 produk. Hal ini menunjukkan bahwa merkuri merupakan bahan yang sering dicampurkan pada kosmetik,” jelas Kepala Badan POM.



Upaya Badan POM dalam mencegah peredaran kosmetik mengandung merkuri antara lain:

Penyusunan dan harmonisasi regulasi pembatasan penggunaan merkuri sebagai pengawet dalam kosmetik dengan sesama anggota negara ASEAN;

Kegiatan penindakan, termasuk penggerebekan industri kosmetik ilegal di Jakarta pada awal tahun 2019; serta

Kegiatan edukasi masyarakat, terutama generasi milenial yang dilakukan di 33 kota serta dihadiri lebih dari 8.000 orang peserta.



Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan dan partisipasi atas implementasi UU Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pengesahan Minamata Convention on Mercury dan Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAN-PPM) khususnya target “Kosmetik Bebas Merkuri” tahun 2020.

Kepala Badan POM juga menyebut akan menjadikan Karawang sebagai Sentra Industri Kosmetik. Badan POM akan memperkuat pembinaan kepada para pelaku usaha kosmetik di Karawang dengan menekan penggunaan merkuri atau bahan berbahaya lainnya seminimal mungkin, bahkan dihilangkan. Dengan begitu, kosmetik yang dihasilkan semakin berkualitas dan mampu bersaing di jalur perdagangan nasional hingga diekspor ke luar negeri. “Adanya Sentra Industri Kosmetik ini akan berkontribusi besar pada industri Indonesia,” imbuhnya pada kegiatan yang dihadiri oleh generasi milenial dari Pelajar SMA dan Perguruan Tinggi Karawang ini.

■ Hendriq Fauzan Kusfanto

“Badan POM berharap generasi milenial dapat menjadi motor perubahan dalam lingkungannya. Generasi milenial dapat mengajak keluarga, rekan, dan lingkungan sekitar untuk waspada dan tidak menggunakan kosmetik mengandung merkuri yang memang mempunyai efek instan untuk memutihkan namun sangat berbahaya bagi kesehatan,”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito





“Pengembangan Industri”

POTENSI INDUSTRI FARMASI INDONESIA UNTUK TUMBUHKAN PEREKONOMIAN NASIONAL

Saat ini, Industri farmasi memang masih menjadi sektor industri yang dianggap menunjukkan kinerja gemilang dan mampu memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) industri pengolahan non migas. Salah satu faktor pemicu pesatnya pertumbuhan industri farmasi adalah adanya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan nilai pasar yang besar. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, industri farmasi bahkan dikategorikan sebagai salah satu industri prioritas berdasarkan kedudukannya yang strategis dan berpotensi besar dalam meningkatkan perekonomian Indonesia.

Pemerintah targetkan Indonesia masuk dalam 15 besar industri farmasi dunia pada tahun 2025. Hal ini hanya dapat dicapai jika industri farmasi Indonesia lebih kondusif dan menarik bagi para investor, terutama investor asing. Investasi asing dibutuhkan untuk menekan defisit neraca perdagangan di sektor ini. Melihat besarnya potensi pasar farmasi, Pemerintah pun terus mendorong pendalaman struktur industri farmasi melalui peningkatan investasi.

Akan tetapi, upaya pengembangan industri farmasi di Indonesia tidak semudah itu dilakukan. Masih ditemui berbagai permasalahan di lapangan. Permasalahan paling besar yang dihadapi adalah dari sisi kemandirian bahan baku, dimana saat ini 90% bahan baku farmasi yang digunakan di Indonesia masih mengimpor dari negara lain. Untuk mengatasi isu tersebut, beberapa upaya telah dilakukan Pemerintah agar industri farmasi dapat terus dikembangkan, mulai dari sektor hulu atau produsen bahan baku hingga ke sektor hilir. Di antaranya melalui pemberian insentif kepada industri farmasi dalam bentuk pengurangan pajak, *tax allowance*, *tax holiday*, serta *super deductible tax* yang diberikan bagi industri yang terlibat dalam program vokasi dan inovasi melalui *research and development* (R&D).

Tidak hanya itu, dari segi regulasi, telah diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 yang mengamanatkan kepada 12 Kementerian dan Lembaga untuk melaksanakan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan nasional melalui penguasaan teknologi dan inovasi, yang bertujuan untuk kemandirian industri bahan baku dan produk farmasi nasional. Dengan harapan berbagai dukungan ini dapat mendorong industri farmasi untuk terus tingkatkan daya saing produk yang dihasilkan.

Deregulasi dan Transformasi Digital sebagai Upaya Mendorong Daya Saing Industri Farmasi

Era revolusi industri 4.0 saat ini memberikan banyak kemudahan bagi setiap sektor untuk melakukan bisnis prosesnya. Selaku pemegang otoritas regulatori di bidang obat, Badan POM juga telah memanfaatkan sistem informasi dengan bertujuan meningkatkan pelayanan publik dalam hal perizinan. Di antaranya dengan pengembangan aplikasi e-registrasi obat, e-Certificate of Pharmaceutical Product (e-CPP/surat keterangan ekspor), e-sertifikasi CPOB, dan e-CDOB dengan mengacu pada Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Obat dan Makanan.

Badan POM pun secara konsisten melakukan deregulasi dan simplifikasi bisnis proses sejak beberapa tahun terakhir, khususnya registrasi obat, melalui mekanisme do and tell dan pengurangan timeline evaluasi untuk registrasi obat. Pada 23 Juli lalu, Badan POM menyelenggarakan Sosialisasi Standar Mutu dan Regulasi di Bidang Obat kepada Pelaku Usaha. Pada acara tersebut, dilakukan sosialisasi terkait revisi Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan Tata Laksana Registrasi Obat atau yang lebih dikenal sebagai "Buku Cokelat".

Revisi tersebut membahas terkait penghilangan mekanisme *approvable letter* pada registrasi, penyederhanaan mekanisme *reliance*, dan percepatan mekanisme registrasi variasi produk. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito yang hadir pada acara tersebut menyatakan bahwa hal ini merupakan respons Badan POM terhadap masukan-masukan dari industri. Adanya deregulasi melalui revisi Buku Cokelat diharapkan dapat mendukung akses dan ketersediaan obat bagi masyarakat, sekaligus mendukung pengembangan industri farmasi nasional.



Deregulasi dan transformasi digital yang ditempuh Badan POM seharusnya semakin memudahkan industri farmasi dalam memenuhi standar kualitas produk yang dihasilkan dalam mewujudkan kemandirian obat dalam negeri. Hal ini pada akhirnya diharapkan dapat membawa produk Indonesia untuk mampu menembus pasar ekspor. Karena salah satu kunci utama produk farmasi Indonesia agar dapat diterima oleh negara tujuan ekspor adalah secara konsisten memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu, terutama negara-negara yang kuat penerapan sistem regulasinya seperti European Union (EU).

Pada September 2019 lalu, Badan POM menyampaikan data survei awal yang dilakukan dan diikuti 41 responden dari berbagai Industri Farmasi untuk mengidentifikasi permasalahan terkait ekspor obat dalam rangka pengawalan peningkatan ekspor farmasi nasional. Hasilnya, sebanyak 51% beranggapan bahwa kendala ekspor adalah terkait pengetahuan terhadap akses pasar, 41% beranggapan bahwa kendala terkait persyaratan larangan-pembatasan (*lartas*) di negara tujuan ekspor, dan sisanya ekspor adalah karena faktor kualitas produk farmasi.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa industri farmasi Indonesia sebenarnya sudah siap. Kualitas produk hanya faktor kecil yang menjadi hambatan ekspor produk farmasi dalam negeri. "Badan POM terus mendorong program dalam rangka mendukung daya saing produk Indonesia. Termasuk salah satu komitmen implementasi Nawa Cita ke-6, yaitu meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing pasar internasional", tutupnya.

■ Dian Hermawati



Sinergi Wujudkan Keamanan Pangan

Era Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan munculnya pembaruan di segala bidang memanfaatkan teknologi sebagai penggerak utamanya, tak terkecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Pelaku UMKM dituntut untuk mampu beradaptasi dengan pesatnya teknologi informasi dan menguasai digitalisasi di berbagai sektor industri, termasuk pangan.

Industri pangan merupakan salah satu kontributor terbesar ekspor nasional dengan capaian kinerja konsisten positif. Tak hanya ekspor, industri pangan juga berperan dalam peningkatan produktivitas, investasi, hingga penyerapan tenaga kerja, tak terkecuali UMKM pangan. UMKM pangan merupakan salah satu kekuatan pendorong pembangunan ekonomi negara yang memiliki peran strategis dalam ekonomi nasional dan ekonomi rakyat, penyediaan dan perluasan lapangan kerja dan lentur terhadap krisis.

Untuk memastikan UMKM berdaya saing, Badan POM bersama Kementerian/Lembaga terkait telah bekerja sama melakukan pengawasan dan pembinaan kepada UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan. Badan POM juga bekerja sama dengan inkubator bisnis di beberapa universitas agar UMKM bisa mengakses teknologi pengemasan yang bisa membuatnya dipasarkan di ritel modern.

Pengembangan UMKM memerlukan banyak “tangan” terlibat di dalamnya, oleh karena itu sinergisme antara pemangku kepentingan ABG (Academic-Business-Government) mutlak diperlukan sehingga strategi pengembangan UMKM dapat berjalan selaras. Diperlukan sinergi Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam menumbuhkan iklim yang kondusif untuk pengembangan usaha bagi UMKM sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Hal ini untuk mendukung agenda Nawa Cita ke 6 dalam meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional.

Berbagai langkah konkrit telah dilakukan Badan POM dalam rangka mendukung pengembangan UMKM, antara lain melakukan pembinaan kepada pelaku usaha pangan dengan melakukan pendampingan intensif dan sosialisasi keamanan pangan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan UMKM, memberikan kemudahan pendaftaran bagi UMKM antara lain dengan memberikan diskon 50% untuk UMKM yang mendaftarkan MD ke Badan POM, mendorong produk UMKM antara lain dengan terus mengkampanyekan pemberian label yang tepat pada produk pangan, serta menyediakan subsite Istana UMKM.



“Mari kita bersama bersinergi dalam mewujudkan keamanan pangan untuk konsumsi pangan yang aman bagi masyarakat, demi SDM unggul Indonesia maju.”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

Salah satu bentuk pendampingan yang diberikan oleh Badan POM antara lain adalah melalui kegiatan “Talkshow Eksistensi UMKM Pangan di Era Revolusi Industri 4.0” di Depok (28/02). Kota Depok dipilih karena Depok merupakan salah satu kota dengan jumlah UMKM pangan yang banyak dan berkembang pesat. Selain itu kota Depok juga memiliki beberapa Perguruan Tinggi dengan program pendampingan UMKM dan banyak mahasiswa dari universitas tersebut yang merupakan wirausaha baru (*start-up*) yang tergabung dalam inkubator bisnis universitas.

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menyampaikan bahwa pembinaan UMKM memerlukan komitmen pemerintah pusat dan daerah, serta peran akademisi terutama untuk wirausaha baru (*start-up*) sehingga dapat bersaing di era revolusi industri saat ini. Lebih lanjut Penny K. Lukito menegaskan bahwa Badan POM memberikan dukungan secara penuh dan fasilitasi terhadap UMKM termasuk UMKM daerah.

■ Grace Meity Ariani

LEBIH MUDAH KONSULTASI IZIN EDAR DENGAN SEMINAR ONLINE

Saat ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah menjadi andalan perekonomian Indonesia. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing UMKM gencar diprioritaskan pemerintah melihat kontribusi dan perannya yang nyata. Tak terkecuali Badan POM yang menunjukkan dukungannya dalam pengembangan industri Obat dan Makanan, karena hampir 80% produk obat tradisional, kosmetik, dan pangan didominasi oleh UMKM.

Badan POM terus berupaya melakukan terobosan dalam memajukan UMKM agar menghasilkan produk yang aman, bermanfaat, bermutu, serta berdaya saing. Dukungan ini berperan kuat dalam membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sekaligus mendukung produk Indonesia berkualitas menuju Indonesia Maju, sesuai fokus Presiden RI terpilih 2019-2024 yaitu pengembangan SDM, penciptaan lapangan kerja, dan pemberdayaan UMKM.

Maka, Badan POM bergerak cepat dalam menguraikan fokus tersebut. Berbagai upaya nyata dilakukan dalam mendukung UMKM, antara lain dengan pembinaan, bimbingan teknis, hingga pendampingan mulai tahap produksi sampai memperoleh Nomor Izin Edar (NIE). Selain tugas rutin tersebut, berbagai strategi khusus juga dilakukan Badan POM untuk meningkatkan daya saing produk UMKM. Bersama tujuh Kementerian/Lembaga (K/L), Badan POM menginisiasi pencanangan “Program Terpadu Lintas K/L dalam Pengembangan UMKM Berdaya Saing”.



Selaku regulator Obat dan Makanan, Badan POM kerap memberikan pelatihan singkat guna mendampingi para pelaku usaha mendapatkan NIE. Berbagai inovasi serta perbaikan di sektor pengembangan teknologi informasi tak luput menjadi perhatian utama Badan POM dalam memberikan pelayanan prima bagi pelaku usaha. Dalam rangka membantu UMKM dalam proses pengurusan izin edar, Badan POM melalui Direktorat Registrasi Pangan Olahan menggelar Seminar Online atau biasa disebut Webinar.

Seminar online merupakan kegiatan seminar yang dilakukan tanpa harus bertatap muka. Peserta dapat berpartisipasi dalam seminar online menggunakan perangkat komputer atau gadget dimana saja, sehingga batasan jarak tidak menjadi hambatan. Badan POM memfasilitasi pendampingan serta konsultasi gratis terkait pelayanan NIE melalui seminar online ini kepada para pelaku usaha dari seluruh penjuru negeri.

Selama tahun 2019, seminar online dilaksanakan 3 (tiga) kali dengan rata-rata peserta diatas 100 orang, yaitu pada 29 Juli, 26 Agustus, dan 23 September. Dalam sekali seminar, durasi yang diperlukan yaitu 2 (dua) jam dengan pembahasan tentang izin edar pangan olahan secara mendalam dan spesifik. Seminar yang bertajuk “Seminar Online, Registrasi Pangan Olahan Badan POM” ini mengulas informasi terkait jenis izin edar Badan POM, kriteria pangan yang wajib didaftarkan, serta tata cara memperoleh izin edar dari Badan POM. Tak kalah penting, juga diulas mengenai keuntungan memiliki izin edar, baik Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) maupun MD/ML.



“Selama ini, banyak produsen/pelaku usaha yang kebingungan terkait pendaftaran izin edar produknya. Banyak pertanyaan yang ingin mereka ajukan namun terkendala waktu dan tempat. Kini, Badan POM menghadirkan pelayanan yang dapat menjangkau seluruh pelaku usaha secara mudah dan hemat,”

Direktur Registrasi Pangan Olahan selaku narasumber utama seminar online.

Melalui seminar ini, pelaku usaha dibimbing dan diberikan informasi secara mendalam terkait perizinan. Tak hanya sampai disitu, narasumber juga melakukan sesi interaksi tanya jawab dengan peserta via live streaming sehingga menepis keresahan para pelaku usaha khususnya di bidang pangan olahan yang beranggapan bahwa untuk mendapatkan NIE harus mendaftarkan langsung ke kantor Badan POM. Padahal pendaftaran produk pangan olahan dapat dilakukan secara online melalui <https://e-reg.pom.go.id/> untuk memudahkan pelaku usaha dalam mengurus perizinan.

Untuk mengikuti seminar online ini, peserta hanya perlu melakukan pendaftaran pada laman <http://registrasipangan.pom.go.id/seminaronline/>. Nantinya peserta akan menerima email terkait informasi seminar online sesuai dengan jadwal yang dipilih. Untuk mengikuti seminar ini, peserta diharapkan memiliki akses internet yang lancar serta gadget atau perangkat komputer yang mendukung.

“Melalui seminar online ini diharapkan seluruh pelaku usaha yang memiliki kesulitan dalam mendaftarkan produknya dapat tereduksi dan lebih mengerti tata cara pendaftaran izin edar di Badan POM. Tidak perlu repot-repot datang ke Jakarta, Badan POM siap membimbing melalui online.” tutupnya.

■ Devi Oktaviani



PENANDATANGAN KESEPAKATAN BERSAMA BADAN POM RI



No	Nama Kerja Sama	Tanggal
Juli		
1	POM dengan Komando Daerah Militer XII / Tanjungpura	17 Juli 2019
Agustus		
2	BPOM dengan Badan Intelijen Negara Daerah Kalimantan Barat	22 Agustus 2019
3	BPOM dengan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kota Pontianak	22 Agustus 2019



No	Nama MOU	Tanggal
Juli		
1	BPOM dengan Badan Pusat Statistik	2 Juli 2019
2	BPOM dengan Universitas Islam Riau	21 Juli 2019
Agustus		
3	BPOM dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri	23 Agustus 2019
4	BPOM dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia	28 Agustus 2019
September		
5	BPOM dengan Dharma Wanita Persatuan	3 September 2019
6	BPOM dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	September
7	BPOM dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar	16 September 2019
8	BPOM dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Gorontalo	19 September 2019



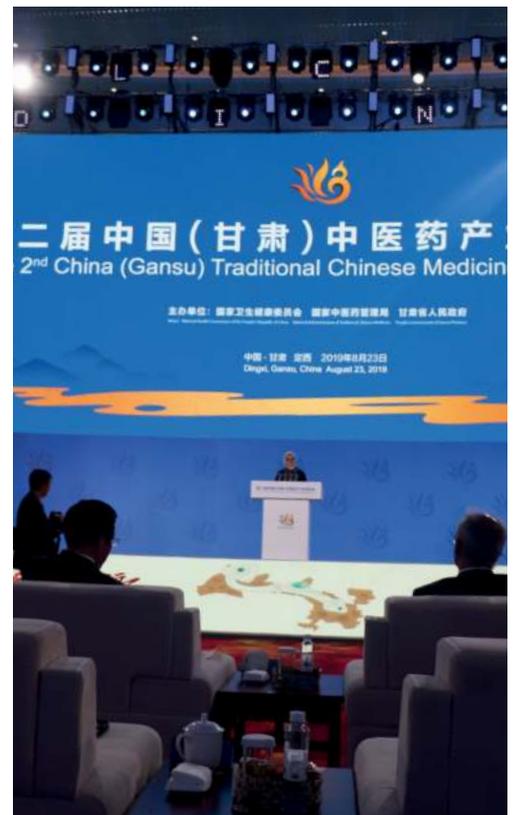
DUKUNG OBAT TRADISIONAL INDONESIA BERDAYA SAING GLOBAL

Kondisi Pasar Obat Tradisional Tiongkok

Secara makro, Tiongkok memiliki posisi penting dalam perdagangan obat tradisional. Dalam Laporan Analisis Sirkulasi Pasar Obat Herbal Tiongkok yang diterbitkan Kementerian Perdagangan Tiongkok pada tahun 2017, Tiongkok mengekspor lebih dari 22,35 juta ton ke seluruh dunia dengan pasar tertinggi adalah Kawasan Asia sebesar 18,54 juta ton. Ini bernilai 971 juta dolar Amerika, dan menyumbang 80% dari total ekspor obat herbal Tiongkok. Negara penerima utama Asia adalah Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong.

Tiongkok juga mengimpor bahan obat tradisional dari Asia sebesar 8,26 juta ton. Ini bernilai 164 juta dolar Amerika dan menyumbang 90,77% dari total impor obat herbal Cina. Thailand dan Indonesia menjadi negara eksportir terbesar bahan obat tradisional ke Tiongkok. Hubungan dagang antara Tiongkok dengan negara-negara Asia menguat dibandingkan dengan kawasan lain. Selain alasan historis, gagasan One Belt Road Initiative berpengaruh pada ekspor impor komoditas ini.

Meskipun situasi makro dianggap stabil, situasi mikro menunjukkan cerita lain. Wilayah penghasil bahan obat tradisional masih membutuhkan dukungan dari pemerintah Tiongkok untuk memastikan kesejahteraan petani dan produsen lokal penghasil bahan obat tradisional. Gansu, sebagai salah satu daerah penghasil utama bahan obat tradisional juga membutuhkan dukungan tersebut. Dengan demikian, pemerintah Tiongkok memilih kota Longxi, Provinsi Gansu menjadi host pertemuan the 2nd China (Gansu) TCM Industry Expo pada 22 - 24 Agustus 2019. Menurut laman resmi pemerintah Tiongkok, pertemuan ini membahas regulasi, teknologi, investasi, dan perdagangan obat tradisional.



Obat Tradisional Indonesia, Masa Depan Asia

Indonesia menjadi salah satu negara eksportir utama bahan obat tradisional di Asia termasuk Tiongkok, Kementerian Perdagangan mencatat Indonesia menempati posisi ke-16 di dunia dan posisi ke-3 setelah Cina dan India di Asia sebagai pemasok bahan herbal produk farmasi dari tahun 2003 - 2007. Di interval tahun yang sama, Indonesia menempati posisi ke-1 di dunia sebagai pemasok bahan herbal produk kosmetik di pasar dunia. Meskipun, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekspor tanaman obat, aromatik, dan rempah-rempah menurut negara tujuan utama ke Tiongkok memiliki tren penurunan dari 2012-2018. Pada 2017, ukuran pasar produk vitamin, herbal, mineral dan suplemen Indonesia masih menempati posisi ke-5 setelah Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, dan Australia.

Kemampuan ekspor ini didukung dengan pertumbuhan industri obat tradisional. Secara historis, pertumbuhan industri obat tradisional di Indonesia setiap tahunnya mengalami peningkatan, tercatat 468 industri yang terdaftar pada 1992 dan meningkat drastis menjadi 807 industri pada tahun 2000. Bukan hanya jumlah industri, pertumbuhan produksi industri obat tradisional juga bersaing dengan industri makanan dan minuman. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan produksi industri mikro farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional meningkat dari tahun 2014-2016. Meskipun sempat lesu di tahun 2017, pada 2018 meningkat kembali. Selain jumlah dan volume produksi, sejak 2010 sudah tercatat 13.000 tanaman herbal.

Data BPS mengenai pertumbuhan produksi bukan hanya mengindikasikan pertumbuhan produksi. Data tersebut merupakan data industri mikro dan kecil, yang berarti pertumbuhan produksi yang meningkat terjadi pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Ini mengindikasikan perbaikan kesejahteraan masyarakat dengan tumbuhnya produsen kecil yang hanya memiliki pekerja 1-4 orang (industri mikro) dan 5-19 orang (industri kecil), dan masih menghadapi tantangan finansial dan keberlanjutan. Persebaran industri obat tradisional juga mengindikasikan perbaikan ini. Berdasarkan data Departemen Perindustrian (Depperin) dan BPS (2008) yang dipetik dalam laporan Kementerian Perdagangan mencatat selain terkonsentrasi di pulau Jawa, 8% industri obat tradisional ada di Sumatera, 5% di Kalimantan, 3% di Sulawesi, dan 2% di Bali.



Memimpin Pasar Global Obat Tradisional

Untuk menegaskan dan menjaga posisi sentral industri obat tradisional di pasar dunia, Badan POM menghadiri beberapa pertemuan internasional. Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito menjadi salah satu pembicara di Forum on High Quality Development of TCM Industry pada pertemuan the 2nd China (Gansu) TCM Industry Expo.

Dalam pidato bertemakan "How to Strengthen Future Collaboration on TCM and Traditional Indonesian Medicine", Kepala Badan POM menegaskan prioritas utamanya dalam menaikkan nilai ekonomi Indonesia melalui pengembangan industri jamu nusantara dengan mempelajari kebijakan dan pengembangan industri obat tradisional Tiongkok untuk menjadi referensi pengembangan kualitas dan standar industri obat tradisional.

Badan POM terus melakukan berbagai upaya untuk mewujudkannya. Badan POM telah berinisiatif membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Pengembangan dan Pemanfaatan Jamu dan Fitofarmaka berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan. Satgas ini bekerja untuk mempercepat 5 aspek: (1) bahan baku, (2) teknologi manufaktur dan standardisasi, (3) uji pra klinik dan uji klinik, (4) pengembangan pelayanan kesehatan tradisional, dan (5) produksi dan promosi fitofarmaka.

Upaya lain adalah penyelenggaraan Seminar Internasional dan Expo Jamu dan Fitofarmaka. Badan POM juga membuat Gerakan UMKM Jamu Berdaya Saing dan Herbal Indonesia Expo 2018 yang merupakan puncak rangkaian kegiatan pendampingan UMKM Jamu pada tanggal 11-12 Desember 2018 di Jakarta. Dalam acara ini, Kepala Badan POM menyerahkan 34 Sertifikat Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) bertahap kepada 34 UMKM Jamu yang mengikuti program pendampingan, 25 Nomor Izin Edar (NIE) Obat Tradisional yang diproduksi oleh 8 UMKM Jamu yang mengikuti pendampingan, serta 24 sertifikat CPOTB dari 6 Industri Obat Tradisional (IOT).



Badan POM memberikan dukungan penuh pada hasil riset untuk pengembangan industri obat tradisional. Badan POM hadir dalam the 27th Annual Meeting of International Congress on Nutrition and Integrative Medicine (ICNIM) di Sapporo sebagai bentuk dukungan pada pengembangan obat tradisional yang dilakukan oleh peneliti Indonesia, dalam hal ini Universitas Hasanuddin, dalam konsep Academia, Business, Government (ABG). Penelitian ini mengenai penggunaan Active Hexose Correlated Compound (AHCC) sebagai suplemen nutrisi dari jamur shiitake untuk pengobatan pasien tuberkulosis. Penelitian ini adalah kelanjutan dari penelitian yang juga dipresentasikan pada pertemuan yang sama pada 2017.

Indonesia mendapat kehormatan untuk berpartisipasi mengikuti pameran pada pertemuan the 2nd China (Gansu) TCM Industry Expo dimana 8 industri obat tradisional Indonesia membuka booth, yaitu PT. Leo Agung Raya, PT. Jamu Borobudur, PT. Sinde Budi, PT. Antazep Medika Internasional, PT. Vermindo, PT. Deltomed, PT. Kalbe Farma dan PT. Harvest Gorontalo Indonesia. Selain itu, juga dilakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara PT. Harvest Gorontalo Indonesia dan Hangzhou Ingent Import and Export Trade Co Ltd (Tiongkok) dan Vittoria Health Science and Technology Co Ltd (Hong Kong) untuk meningkatkan daya saing obat tradisional Indonesia.

Pasar terus berubah dan masa depan obat tradisional ditentukan oleh langkah yang diambil. Tingkat laju pertumbuhan ukuran pasar herbal diproyeksikan dari 2017-2022, Tiongkok menempati posisi ketiga dan Indonesia di posisi keempat. Badan POM telah menorehkan langkah-langkah inovatif guna mempertahankan posisi ini dan langkah-langkah strategis lain akan terus dilakukan agar obat tradisional Indonesia berdaya saing global.

■ Fadlan Khairul Anam



PERAN MASYARAKAT

PENGAWASAN OBAT BERSAMA, PERKUAT KETAHANAN BANGSA

Kasus pemanfaatan kembali obat kedaluwarsa, obat sisa, dan obat yang rusak oleh oknum yang tidak bertanggungjawab kembali marak saat ini. Kasus ini merupakan akibat dari ketidaktepatan penanganan limbah obat di masyarakat. Pertanyaannya “sudah berapa banyak dari kita yang membuang sampah obat dengan benar?” perlu kita tanyakan kepada diri kita mengingat peredaran obat kedaluwarsa sangat mengkhawatirkan untuk aspek kesehatan masyarakat.

Kasus ini berawal dari pemanfaatan obat-obat kedaluwarsa dan rusak termasuk kemasan obat yang tidak termusnahkan secara baik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan digunakan untuk keperluan produksi obat ilegal melalui pemanfaatan baik sebagai bahan baku (*re-use*) dan pelabelan ulang (*re-labeling*) dengan modus sederhana seperti perubahan/perpanjangan tanggal kedaluwarsa.

Untuk memberantas peredaran obat ilegal dan penyalahgunaan obat tersebut, sekaligus meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Badan POM menginisiasi Kampanye “Ayo Buang Sampah Obat” di Area Parkir Utara Sarinah (01/09). Selain di Jakarta, gerakan ini serentak diluncurkan dan dilaksanakan di 14 kota yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Serang, Banjarmasin, Mataram, Makassar, Medan, Kendari, Pekanbaru, Palembang, Yogyakarta, Denpasar, dan Batam.

“Obat kedaluwarsa atau rusak sudah tidak memberikan efek terapi dan berpotensi memberikan efek samping yang tidak diinginkan jika digunakan, karena itu Badan POM mengajak masyarakat belajar cara membuang obat kedaluwarsa, obat sisa, dan obat rusak dengan benar agar tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh oknum untuk membuat obat ilegal atau palsu,”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

Kampanye “Ayo Buang Sampah Obat” yang termasuk dalam Gerakan Waspada Obat Ilegal (WOI) merupakan salah satu gerakan pemberdayaan masyarakat yang tidak terpisahkan dari Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat (Aknas POIPO) yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo tahun 2017 lalu.

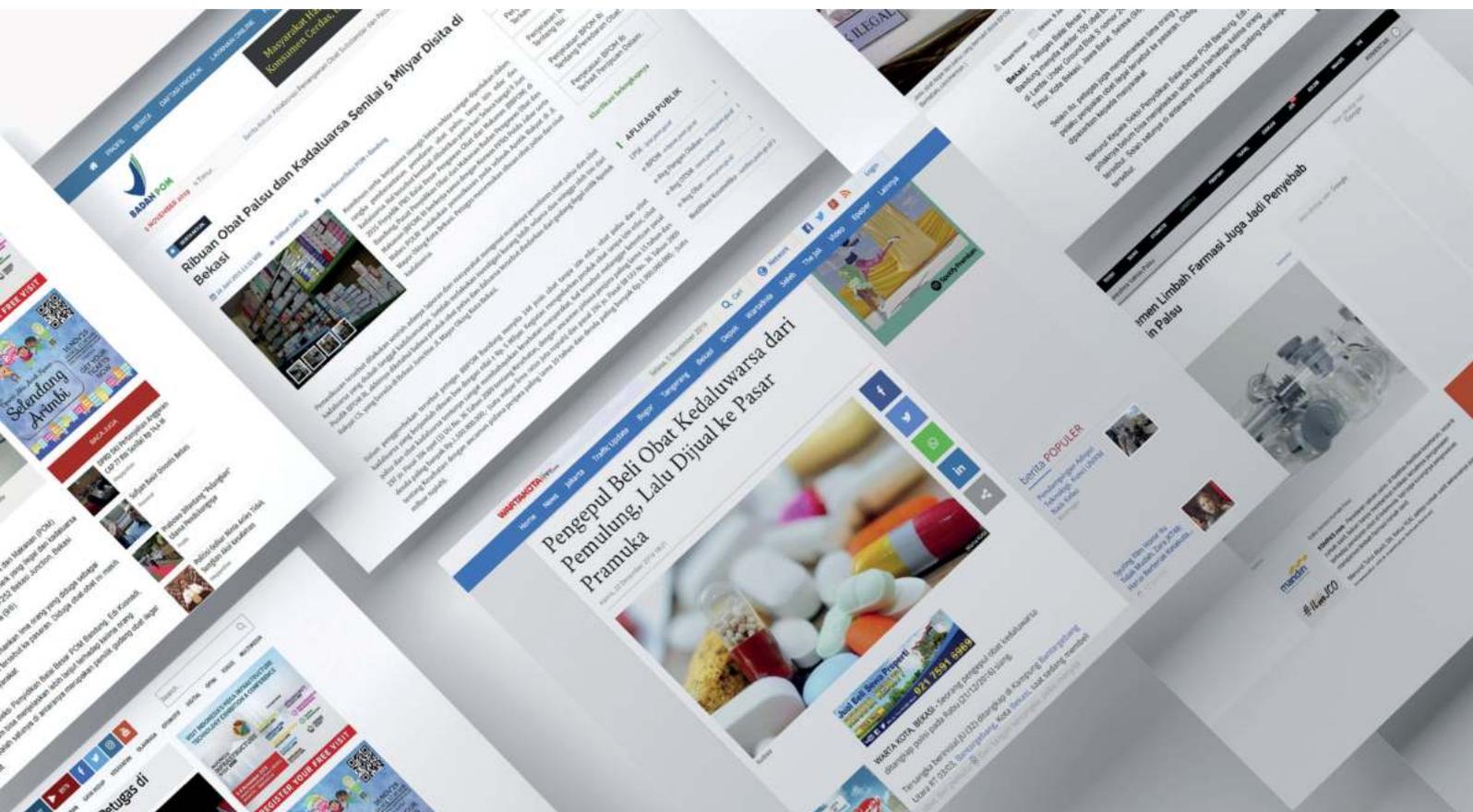
Bersama Ikatan Apoteker Indonesia (IAI), lintas sektor dan pelaku usaha lainnya, Badan POM mengedukasi masyarakat untuk waspada terhadap obat ilegal dan palsu dengan cara Buang Sampah Obat Kedaluwarsa dan Rusak dengan benar atau dapat mengembalikan obat ke apotek-apotek bertanda khusus yang ditunjuk sebagai lokasi pengembalian obat kedaluwarsa dan rusak sehingga kesempatan dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab mengedarkannya dengan menjual kembali, meraih keuntungan sebesar-besarnya, tanpa memandang dampaknya bagi masyarakat luas dapat berkurang atau tidak terjadi lagi.



Selama bulan September sampai 11 Oktober 2019, masyarakat dapat membuang sampah obat kedaluwarsa di 1000 apotik yang tersebar di 15 kota tersebut. Kegiatan ini akan dilaksanakan secara berkesinambungan sehingga tercipta budaya masyarakat membuang sampah obat kedaluwarsa dan rusak dengan benar, baik mandiri atau dikembalikan ke apotek terdekat untuk dimusnahkan sesuai ketentuan. Setelahnya, masyarakat yang memiliki obat kedaluwarsa dapat melakukan pemusnahan mandiri atau dapat menyimpan obat tersebut dan mengembalikannya ke Apotek sesuai jadwal pengembalian obat.

Membangun pengawasan Obat dan Makanan di level nasional tidak cukup hanya satu lapis saja tetapi perlu pengawasan yang berlapis. Inisiasi gerakan “Ayo Buang Sampah Obat” ini merupakan tanggung jawab kita bersama sebagai masyarakat Indonesia. Dukungan dan peran aktif seluruh pihak sangat diperlukan baik pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

■ Armacata

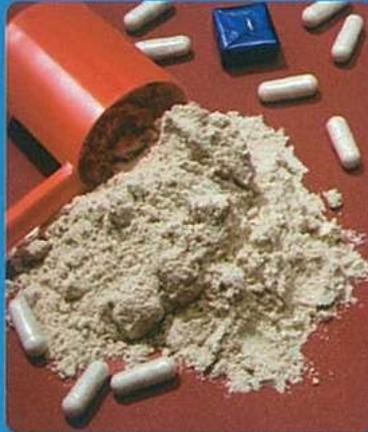


PENYALAHGUNAAN OBAT KEDALUWARSA

Obat kedaluwarsa dan rusak yang tidak dimusnahkan dengan benar dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.



- ▶ Dicampurkan pada jamu

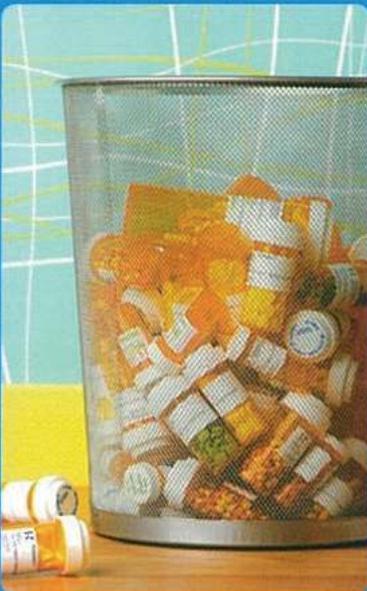


- ▶ Bahan baku obat palsu, dll



- ▶ Tanggal kedaluwarsa diganti dan dijual kembali

Maka dari itu perlu penanganan yang optimal untuk membuang obat rusak dan kedaluwarsa. Salah satu cara yang tepat untuk membuang obat kedaluwarsa dan rusak tersebut adalah:



- ▶ Pisahkan obat-obatan yang telah kedaluwarsa dan rusak dengan obat-obat yang masih baik



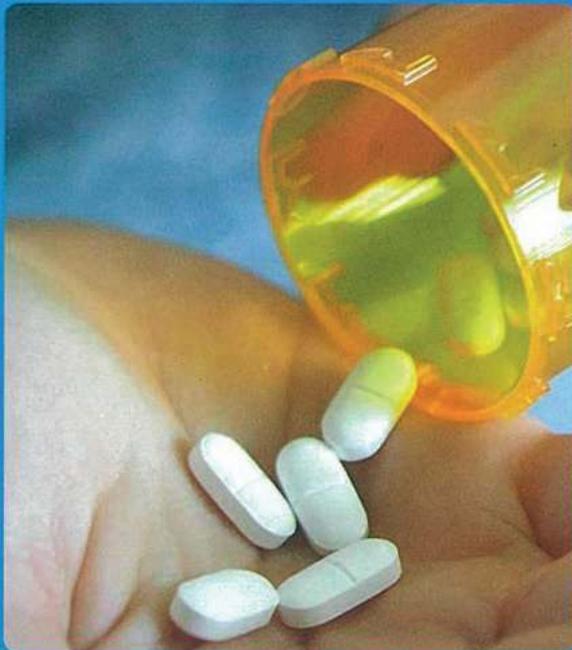
- ▶ Hilangkan label dari wadah obat, rusak wadah obat jika memungkinkan (*strip* dan *blister* dapat digunting)



- ▶ Keluarkan obat dari kemasan, rusak obat dan campur dengan bahan lain seperti ampas kopi, tanah atau sampah rumah tangga lainnya.

AYO BUANG SAMPAH OBAT!

GERAKAN WASPADA OBAT ILEGAL



- ▶ Khusus untuk antibiotik, hindari dibuang ke saluran air atau tanah yang dekat dengan sumber air untuk menghindari pencemaran dan resistensi antibiotik.



- ▶ Pastikan bentuk obat berubah dan tidak bisa dimanfaatkan lagi

AYO BUANG SAMPAH OBAT!

Adalah program pemberdayaan masyarakat dalam rangka Gerakan Waspada Obat Ilegal yang merupakan kelanjutan dari Aksi Nasional Pemberantasan Obat Ilegal dan Penyalahgunaan Obat yang dicanangkan oleh Presiden RI. Kegiatan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat membuang sampah obat kadaluarsa dan rusak dengan benar sehingga dapat mencegah terjadinya pemanfaatan kembali obat tersebut.

Dengan *tagline* "**Ayo Buang Sampah Obat!**", Badan POM berkolaborasi dengan asosiasi profesi dan pihak lainnya untuk mengedukasi masyarakat bagaimana cara membuang obat dengan benar. Jika masyarakat tidak dapat memusnahkan secara mandiri, maka dapat mengembalikan obat kadaluarsa dan rusak tersebut ke *dropbox* yang tersedia di apotek bertanda khusus, untuk didata dan dimusnahkan sesuai ketentuan bekerja sama dengan Badan POM.

Informasi lebih lanjut hubungi: Contact Center HALO BPOM di nomor telepon 1-500-533, SMS 0-8121-9999-533, email halobpom@pom.go.id, [twitter@BPOM_RI](https://twitter.com/BPOM_RI), Instagram: [bpom_ri](https://www.instagram.com/bpom_ri)



yang meraih opini WTP
untuk LK Tahun 2014-2018



GALERI BADAN POM





GALERI BADAN POM







WACANA

“SDM UNGGUL”

PERINGATAN HARI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-74

Perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia merupakan momen yang selalu dinantikan oleh seluruh rakyat Indonesia setiap tahunnya, tak terkecuali badan POM. Moment tersebut seolah membawa kita sejenak mengheningkan cipta, kembali mengenang jasa pahlawan yang berani dan tangguh melawan penjajah dengan segenap jiwa dan raga demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Indonesia, yang terdiri dari ribuan pulau memiliki beragam suku, budaya, bahasa, dan agama, bersama padu menyatukan tekad dan harkat martabat setelah mengalami masa penjajahan/imperialisme bangsa lain selama ratusan tahun.

Kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi pada pidato fenomenal Soekarno yang didampingi Moh. Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 pagi hari, yang dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih. Peristiwa tersebut menjadi momen bersejarah bagi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.



Tahun 2019, tepat 74 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, peristiwa tersebut dikenang kembali melalui penyelenggaraan upacara di setiap sekolah dan instansi pemerintahan. Berbagai ajang perlombaan juga diselenggarakan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan, tidak terkecuali Badan POM. Semarak perayaan hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 dilaksanakan di seluruh kantor Badan POM baik di Pusat maupun Balai Besar/ Balai POM serta Kantor Badan POM di Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.

Antusiasme Pegawai Badan POM Sambut Hari Olah Raga dan Seni

Kemeriahan menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 sangat kental terasa di kantor Badan POM, bahkan sebelum tanggal 17 Agustus tiba. Badan POM bahkan menonaktifkan seluruh aktivitas pelayanan publik selama 1 (satu) hari untuk menyelenggarakan Hari Olah Raga dan Seni (One Day Sport) pada Kamis (15/08).

Rangkaian acara Hari Olah Raga dan Seni diawali dengan penyerahan estafet obor pembangkit semangat yang dibawa oleh Pelari Badan POM (BPOM Runners) berkeliling di wilayah sekitar Percetakan Negara-Johar Baru, kemudian diserahkan kepada Kepala Badan POM. Selanjutnya, Kepala Badan POM menyalakan tungku dengan obor, yang terus menyala sepanjang pelaksanaan acara. Seluruh peserta kontingen yang berasal dari unit kerja eselon I melakukan defile dan performance dilanjutkan dengan serangkaian perlombaan antara lain menghias tumpeng, tarik tambang, bakiak, balap karung, catur, grup vokal, futsal, voli, tenis meja, dan badminton.



“Kegiatan ini selain diselenggarakan untuk menyemarakkan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-74, juga sebagai penyeimbang rutinitas pekerjaan sehari-hari melalui kegiatan olah raga dan seni,”

Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito

Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74

Tepat pada hari Sabtu, 17 Agustus 2019 pukul 08:00 WIB, dengan berbalut pakaian adat daerah Minangkabau Sumatera Barat, Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito memimpin upacara Pengibaran Bendera Merah Putih yang dilaksanakan di halaman Pusat Pengembangan Pengujian Obat Nasional (P3OMN). Pengibaran bendera dilaksanakan oleh dua pasukan, yaitu Pasukan 17 sebagai pasukan pengibar dan Pasukan 8 sebagai pembawa bendera. Seluruh petugas upacara mengenakan seragam Paskibra, sedangkan peserta upacara mengenakan pakaian khas daerah asal masing-masing sebagai representasi dari aneka kebudayaan Indonesia.

Dalam sambutannya, Kepala Badan POM menyampaikan apresiasi dan ungkapan terima kasih kepada para petugas upacara yang terdiri dari Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) angkatan tahun 2018, yang merupakan penerimaan CPNS dengan formasi terbanyak sejak berdirinya Badan POM.

Dalam rangkaian upacara tersebut juga dilakukan penyerahan penghargaan Satya Lancana Karya Satya kategori 10, 20, dan 30 tahun kepada para pegawai Badan POM yang telah mengabdikan dirinya di Badan POM, sebagai pelayan masyarakat. Upacara diakhiri dengan foto bersama dengan seluruh pegawai Badan POM.

Di akhir sesi foto bersama, Kepala Badan POM berpesan agar terus berjuang membangun bangsa. “Semoga dengan mengenang jasa pahlawan seraya memanjatkan doa agar mereka mendapat tempat terbaik di sisi-Nya, kita senantiasa diberikan kekuatan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan dalam meraih kemerdekaan ini, dengan membangun bangsa menjadi negara yang makmur dan sejahtera,” tutupnya dengan penuh semangat. Dirgahayu Republik Indonesia. “SDM Unggul Indonesia maju” NKRI Harga Mati!

Idul Adha, Pengorbanan untuk yang dicintai

Hari Raya **Idul Adha** merupakan hari yang sarat makna dan kaya hikmah. Ada banyak pelajaran yang bisa dipetik dari **Hari Raya kurban** ini, salah satunya adalah pengorbanan untuk yang dicintai. Jika kita menengok sisi historis dari perayaan Idul Adha ini, maka pikiran kita akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan Allah SWT untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Ismail putranya, yang saat itu masih menyusui, di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Nabi Ibrahim tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu tersebut, tapi baik Nabi Ibrahim maupun istrinya menerima perintah itu dengan ikhlas dan tawakal.

Kemudian Nabi Ibrahim menerima perintah untuk menyembelih anaknya melalui mimpi. Nabi Ibrahim lalu menyampaikan perintah itu kepada anaknya. Mereka lalu menaati perintah itu. Saat akan disembelih, Allah mengganti sang anak dengan seekor hewan ternak yang besar. Lewat perintah itu, Allah hendak menguji ketaatan Ibrahim. Kisah ini terdapat dalam Alquran surat Ash-Shaffat ayat 103-107. Kisah Nabi Ibrahim yang rela mengorbankan anak yang dicintainya ini menjadi dasar pelaksanaan kurban. Kurban bermakna pengorbanan pada sesuatu yang dicintai, yakni harta yang telah diperoleh. Dengan berkorban, artinya seorang Muslim memberikan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, menyembelihnya, dan membagikan dagingnya kepada orang-orang di sekitar. Dengan berkorban, rasa kasih sayang dan peka terhadap sesama ditumbuhkan.



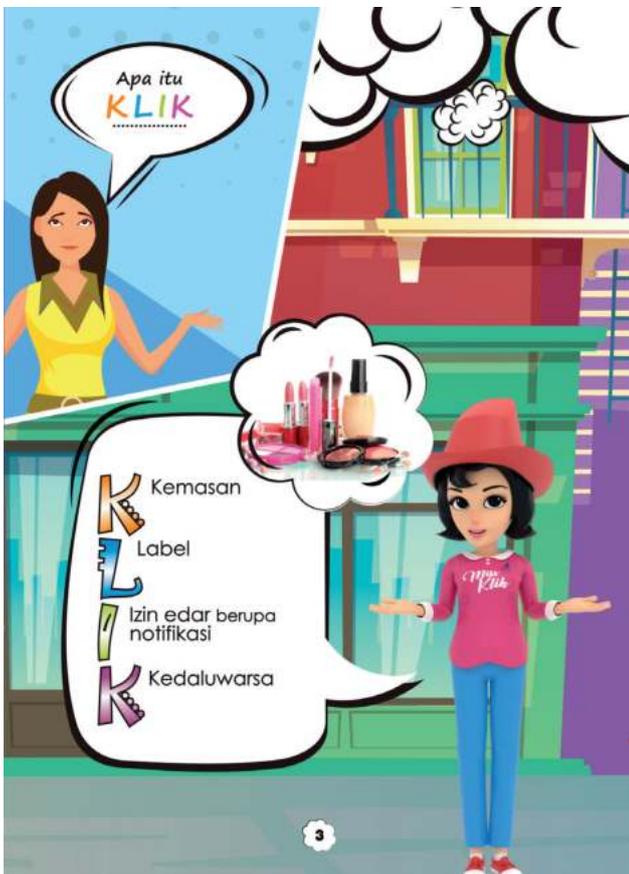
Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1440 H, Badan POM melaksanakan pemotongan hewan kurban di Masjid As-Salam, Rabu (14/07). Tahun ini, Badan POM menyembelih 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Sebelumnya keenam hewan kurban diperiksa kesehatannya terlebih dahulu. Prosesi penyembelihan dihadiri langsung oleh Kepala Badan POM RI, Penny K. Lukito beserta jajaran. Penny K. Lukito secara simbolis menyerahkan mandat kepada penyembelih agar melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memotong hewan kurban. "Hari ini kita menyembelih 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing," jelasnya.

Daging kurban yang telah dipotong kemudian dimasukkan ke dalam besek bambu beralaskan daun pisang dan disalurkan kepada ratusan mustahiq yang telah mendapatkan kupon jauh hari sebelum pelaksanaan penyembelihan. Harapannya agar dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya, sebagai bentuk rasa syukur dan ketaqwaan mendekati diri kepada Allah, Tuhan YME.



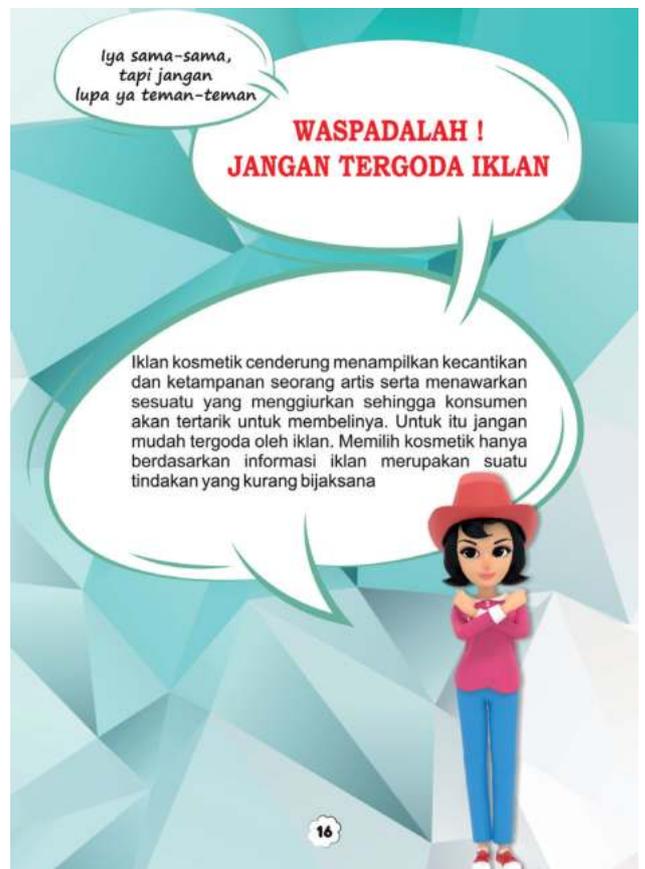












INFORMASI OBAT DAN MAKANAN Ada Dalam Genggaman Anda.

www.pom.go.id



@bpom.official



bpom_ri



@bpom_ri



Badan POM RI



InfoBPOM



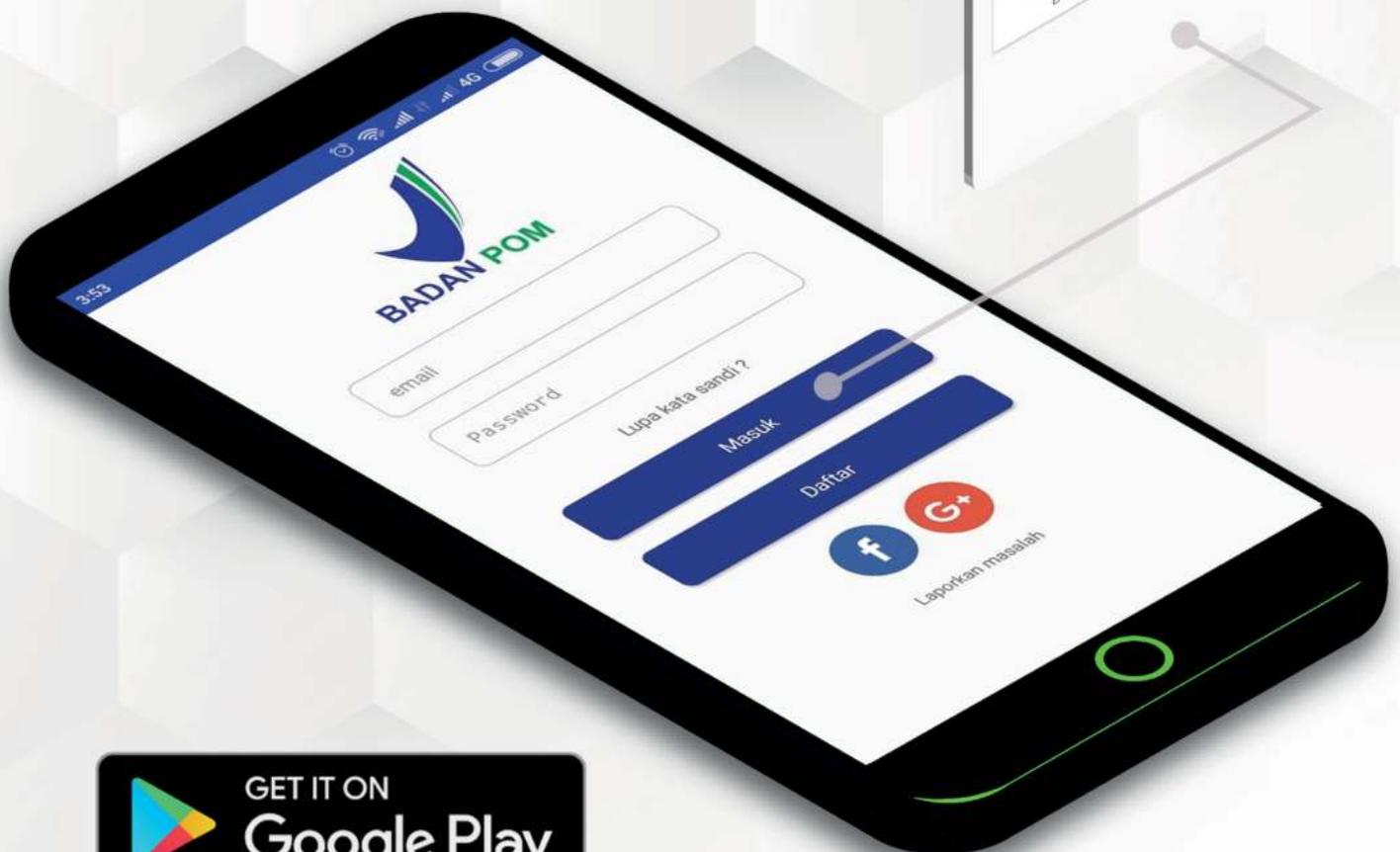
BPOM RI

Aplikasi BPOM Mobile



SCAN TO
DOWNLOAD

BPOM *Mobile* adalah aplikasi untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berita terbaru dari BPOM, mengecek suatu produk dengan memindai kode QR atau kode batang, serta mengirimkan pengaduan terhadap suatu produk.



Jika **Sahabat BPOM** ingin menyampaikan informasi dan permasalahan terkait **Obat dan Makanan** silahkan hubungi kami



081.191.81.533



081.21.9999.533



halobpom@pom.go.id



@halobpom1500533



halobpom1500533_

